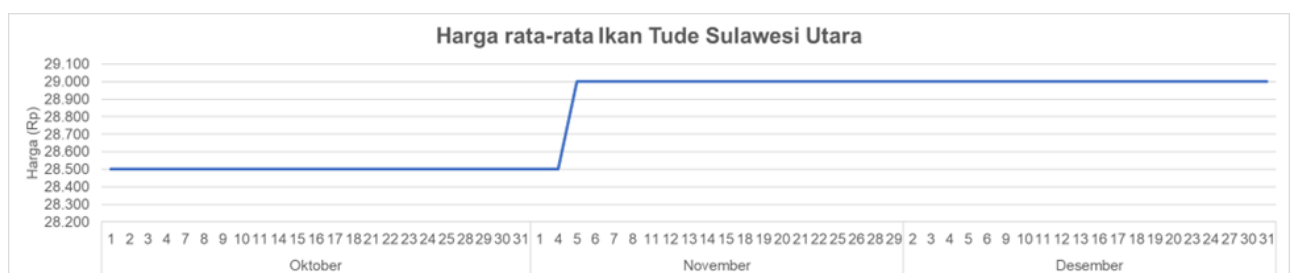


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada Triwulan IV 2024, harga berbagai barang umumnya turun. Berdasarkan rilis BPS, Provinsi Sulawesi Utara tercatat mengalami deflasi sebesar -0,07% (mtm) atau inflasi 0,44% (yoy) pada Desember 2024. Inflasi Provinsi Sulawesi Utara dihitung berdasarkan pencatatan perkembangan Indeks Harga Konsumen pada 4 kota/kabupaten pencatatan IHK dimana Kota Manado tercatat deflasi sebesar -0,04% (mtm) atau inflasi 0,75% (yoy), Kotamobagu deflasi -0,35% (mtm) atau inflasi 0,67% (yoy), Minahasa Selatan inflasi 0,16% (mtm) atau deflasi -0,34% (yoy), dan Minahasa Utara deflasi -0,14% (mtm) atau inflasi 0,02% (yoy).
- Secara bulanan (mtm), komoditas yang memberikan andil inflasi pada triwulan IV antara lain ikan selar/tude (0,09%), ikan malalugis/sorihi (0,05%), minyak goreng (0,04%), bawang merah (0,04%), dan daging babi (0,02%). Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain: cabai rawit (-0,30%), tomat (-0,06%), beras (-0,05%), lemon (-0,03%) dan angkutan udara (-0,03%).
- Sementara itu, secara tahun ke tahun (yoy) komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain daging babi (0,95%), emas perhiasan (0,24%), minyak goreng (0,15%), bawang merah (0,14%) dan ikan selar/tude (0,12%). Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai rawit (-0,44%), tomat (-0,27%), cabai merah (-0,17%), telepon seluler (-0,06%) dan angkutan udara (-0,06%).



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Secara bulanan deflasi Sulawesi Utara ditahan oleh komoditas perikanan seperti ikan selar/tude dan ikan malalugis/sorihi yang disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang kondusif sehingga mengurangi frekuensi nelayan melaut. Inflasi minyak goreng disebabkan oleh naiknya harga bahan baku minyak goreng kemasan, disamping stok yang terbatas. Sementara itu kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di tengah kondisi stok bawang yang terbatas. Daging babi juga masih mengalami inflasi yang didorong oleh permintaan pada HBKN Nataru di tengah stok

daging babi yang masih belum pulih pasca virus ASF.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi Oktober 2024

- Panen cabai rawit di ponpes hidayatullah dan Padi di PATUA P3A banyumuli kab Bolmong, 1-2 Oktober;
High Level Meeting TPID Kab Kepl Sitaro, 7 Oktober;
- Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak se Sulut dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke 44 tahun 2024 16, Oktober;
Pengadaan 900 ekor Babi dari Bali oleh PemProv bekerjasama dengan pengusaha Babi, lewat Pelabuhan Amurang Minahasa Selatan 17 Oktober;
Kolaborasi TPID Minahasa Utara melalui PUD Klabat dengan Kelompok Tani melakukan kegiatan RICA MAPALUS (Rica Murah) di Pasar Airmadidi, 19 Oktober;
- Komunikasi 'bijak belanja' di peringatan hari Oeang bersinergi dengan KPw Kemenkeu Sulut, 26 Oktober;
- Capacity Building dan Study Visit TPID Provinsi Sulawesi Utara (TPID Sulut, Minahasa dan Minahasa Utara) ke TPID Kepulauan Riau sebagai pemenang Provinsi berkinerja terbaik wilayah Sumatera TPID Award 2023 pada 30, 31 Oktober;
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota;
- Rapat Koordinasi Mingguan TPID Prov. Sulut.

Upaya pengendalian inflasi November 2024

- Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menyelenggarakan Capacity Building TPID Provinsi dan Kab/Kota 19-20 November;
- Pelaksanaan program Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) melakukan tanam perdana Cabai Rawit dengan smart irrigation system di lahan Poktan di Kotamobagu;
- Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menyelenggarakan Capacity Building PATUA seri V, 21-22 November;
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota;
- Rapat Koordinasi Mingguan TPID Prov. Sulut.

Upaya pengendalian inflasi Desember 2024

- Pengadaan 800 ekor Babi dan Daging Babi Beku dari Bali oleh PemProv bekerjasama dengan pengusaha Babi, lewat Pelabuhan Amurang Minahasa Selatan, 7 Desember;
- Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menyelenggarakan High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara serta showcasing GNPIP Tahun 2024, 10 Desember;
- Gerakan Pasar Murah (GPM) dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kota Kotamobagu, 10 Desember;
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di Manado 13 Desember;
- Pasar Murah Bersubsidi Daging Babi TPID Kab. Minut 17 Desember;
Biro Perekonomian Setda Prov. Sulut melakukan Pengecekan harga Bahan Pokok di

Pasar Bersehati dan Pinasungkulan 17 Desember;

- Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di Manado 17 Desember;
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di Manado 19 Desember;
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di Manado dan Minahasa 20 Desember;
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di Minut 21 Desember;
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota;
- Rapat Koordinasi Mingguan TPID Prov. Sulut.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara terus melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar untuk memberikan keterjangkauan harga bagi masyarakat Sulut seperti Rangkaian GPM dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-44 pada tanggal 16 - 22 Oktober. Panen cabai rawit dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatullah dan padi di PATUA P3A Banyumulih Kab. Bolaang Mongondow pada 1 - 2 Oktober. Sebagai bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota TPID, pada tanggal 26 Oktober 2024 TPID Provinsi Sulawesi Utara bersinergi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Utara melakukan Komunikasi “Bijak Belanja” di Peringatan Hari Oeang. Pada tanggal 21 - 22 November PATUA melakukan penanaman perdana cabai rawit dengan smart irrigation system di lahan poktan Kotamobagu. Para petani juga mendapatkan bimbingan melalui Capacity Building PATUA seri V.

Dalam rangka mendukung peningkatan pasokan komoditas pangan di Sulut dilakukan penanaman perdana komoditas cabai yang merupakan implementasi sinergi pilot project GNPIP bersama Darma Wanita Zona Bakamla Tengah di Kabupaten Minahasa. Selain itu, sebagai bentuk penguatan kapasitas strategis dan pelaporan dari anggota TPID se-Sulut, ada 10 November telah diadakan Capacity Building dan HLM TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut yang membahas mengenai evaluasi pelaporan TPID terkait pengendalian inflasi yang telah dilakukan, penyusunan draft Roadmap Pengendalian Inflasi periode 2025 - 2027 serta showcasing GNPIP.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemantauan perkembangan harga pasca HBKN khususnya komoditas strategis seperti daging babi, perikanan tangkap, dan bawang merah yang selama Desember menunjukkan gejolak harga untuk mendekteksi dini potensi lonjakan harga dan memastikan pasokan barang tetap mencukupi, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.
- Melakukan evaluasi terhadap strategi pengendalian inflasi yang dijalankan selama Desember 2025 sebelum menyusun strategi pengendalian inflasi 2025 yang efektif dan tepat sasaran. Evaluasi dapat berupa identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan selama 2024 sehingga diupayakan langkah-langkah yang bersifat korektif.

Memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat, termasuk distributor, pedagang besar, eceran dan instansi terkait dalam menyikapi apabila ada indikasi isu pemberitaan yang tidak wajar terkait harga komoditas sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan harga.

Menyelaraskan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat, serta pemberian subsidi pada komoditas tertentu jika memungkinkan tanpa mengganggu keseimbangan fiskal.